

Al-Dalil

Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum

Vol. 3, No. 1, Maret 2025

ISSN: 2987-0976

Upaya Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Keluarga Berbasis Sila Pertama Pancasila Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)

Alif Kurniawati¹, Mohammad Mardiyan Toha², Yudi Widagdo Harimurti³

1,2,3 Universitas Trunojoyo

210111100013@student.trunojoyo.ac.id¹, 210111100171@student.trunojoyo.ac.id², yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id³

Abstract

Kata Kunci: Pembentukan Karakter Bangsa Pancasila Perspektif Hukum

This study discusses efforts to form national character through the role of the family based on the values of the first principle of Pancasila, namely Belief in the Almighty God, from a legal perspective. This study was conducted in Dasok Village, Pademawu District, Pamekasan Regency, with the aim of exploring the role of the family as the main institution in instilling religious and moral values as part of the formation of national character. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the application of the values of the first principle of Pancasila in family life in Dasok Village has a significant influence in forming the character of the younger generation who are religious, moral, and have integrity. In addition, from a legal perspective, it was found that families have a legal and social responsibility to provide religious-based moral education that is in line with the values of Pancasila. This study emphasizes the importance of collaboration between families, communities, and the government in strengthening the formation of national character based on the first principle of Pancasila.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya pembentukan karakter bangsa melalui peran keluarga yang dilandasi nilai-nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dari perspektif hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran keluarga sebagai lembaga utama dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilainilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan keluarga di Desa Dasok memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, bermoral, dan berintegritas. Selain itu, dari perspektif hukum ditemukan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab hukum dan sosial untuk memberikan pendidikan moral berbasis agama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter bangsa berdasarkan sila pertama Pancasila.

Corresponding Author: Alif Kurniawati

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email: 210111100013@student.trunojoyo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala kekuasaan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak semena-mena dan semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh Undang-Undang, konsepsi rule by law not rule by man dinyataan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan atas kekuatan belaka (Machstaat). Konsep negara hukum menurut beberapa ahli harus memenuhi 4 unsur, yakni:

- 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2. Negara dijalankan berdasarkan asas Trias Politica.
- 3. Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang.
- 4. Adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh pemerintah(Rahmatullah, 2020).

Adanya konsep tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus karena negara hukum berjalan di atas asas Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Pancasila merupakan jati diri dari kepribadian bangsa Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia Pancasila dihayati sebagai corak khas dan tidak bisa dipisahkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang di dalamnya mengandung makna dan arti penting untuk diamalkan.

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menjadi sumber hukum memiliki arti semua hukum disusun haris berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu:

"....maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia..."

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia tidak dapat mengelak dari sifat kodratnya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan manusia menghadapi dua hak dan kewajiban yaitu sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga masyarakat yang memiliki kewajibannya untuk orang lain namun juga memenuhi wajibnya bagi orang lain (Sinal, 2017). Negara Pancasila bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 bahwasanya negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yang bersifat majemuk tunggal yang artinya Pancasila terdiri dari 5 sila yang tidak dapat berdiri sendiri secara utuh. Nilai=Nilai sila pertama memberikan kebebasan serta kesempatan kepada masyarakat untuk memeluk dan memegang teguh ajaran masing-masing di setiap aliran agama sesuai dengan kepercayaan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keberadaan suatu bangsa.

Secara yuridis, Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama Pancasila dan terkandung dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Dalam ilmu hukum kedudukan pembukaan UUD NKRI 1945 yang di dalamnya terkandung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan *staats fundamental norm* dalam negara Indonesia yang kemudian memiliki pengertian bahwasanya sila pertama Pancasila merupakan prinsip konstitutif maupun regulated untuk tertib hukum Indonesia, sehingga Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum di Indonesia serta hukum positif di bawahnya.

Terjadinya banyak penyimpangan/kesalahan sebenarnya berakar dari tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dengan nilai-nilai di setiap silanya telah banyak di sebar luaskan ke berbagai daerah dan lembaga. Meskipun terdapat pendidikan Pancasila tetapi ketiadaan aturan tentang pengaturan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah praktik kehidupan yang mengakibatkan warga negam di Indonesia belum menemukan nilai-nilai Pancasila yang wajib dilaksanakan. Sebagai lingkungan terdekat, keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai Pancasila dalam keluarga dapat diperkenalkan, diterapkan dan diperkuat sejak usia dini. Keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan merupakan penentu masa depan. Sehingga kehidupan keluarga inti sangat berkontribusi dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian. (Ariani, 2019) Peran keluarga dan masyarakat tetap tidak tergantikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter. Karena sejatinya nilai-nilai moral tidak bisa dipelajari tetapi harus dibentuk dan ditanamkan melalui pembiasaan.

Pembiasaan untuk berbuat baik; pembiasaan berlaku jujur; malu berbuat curang; malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak berbentuk secara instan, hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam jiwa, sehingga anak dapat berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang telah

melekat dalam jiwa mereka (Ahmad et al., 2021). Upaya penguatan karakterpada masa sekarang ini dinilai makin memudar akibat terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain globalisasi, pengaruh budaya luar, contoh lain yang menyimpang dari penerapan nilai-nilai Pancasila adalah narkoba, tawuran antar pelajar, geng motor dan minum-minuman beralkohol. Semua itu merupakan wujud dari bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan nilai Tuhan Yang Maha Esa.(Amalia & Najicha, 2023)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan ini adalah metode empiris. Metode empiris adalah metode yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. (Sonata, 2015) Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya. Adapun penelitian ini juga menggunakan penelitian jenis deskriptif karena menyajikan gambaran dari permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian lapangan menggunakan data empiris dengan wawancara masyarakat setempat.

3. PEMBAHASAN

A. PERAN KELUARGA SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS NILAI SILA PERTAMA PANCASILA

Keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter individu yang nantinya menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa. Sebagai lingkungan pertama tempat seorang anak belajar dan berkembang, keluarga merupakan wahana utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila ini menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, serta penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara (Sudrajat et al., 2020). Di dalam keluarga, nilai-nilai Sila Pertama Pancasila diajarkan melalui berbagai cara, seperti pembiasaan beribadah secara rutin sesuai agama masing-masing, pengenalan tentang keesaan Tuhan, serta pembentukan sikap syukur dan sabar. Misalnya, orang tua di Desa Dasok sering kali mempraktikkan pendidikan religius secara informal dengan mengajak anak-anak untuk beribadah bersama, membaca kitab suci, atau mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Aktivitas ini menjadi dasar untuk membangun keimanan dan karakter religius yang kuat sejak dini.

Selain itu, keluarga juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai etika universal yang bersumber dari ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan bimbingan orang tua, anak-anak belajar untuk memahami bahwa keberadaan Tuhan memengaruhi cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks Desa Dasok, banyak keluarga yang mengintegrasikan ajaran agama dalam aktivitas sehari-hari, seperti menyisipkan nasihat-nasihat keagamaan saat makan bersama atau saat menghadapi konflik di rumah. Peran keluarga dalam pembentukan karakter religius ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya setempat. Desa Dasok, sebagai bagian dari Kecamatan Pademawu di Kabupaten Pamekasan, dikenal memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi keislaman. Lingkungan yang religius ini memperkuat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, di dalam keluarga. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pendidik pertama tetapi juga sebagai teladan nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan.

Oleh karena itu, keluarga di Desa Dasok tidak hanya menjadi tempat pembentukan karakter anak tetapi juga pilar penting dalam menjaga integrasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Ketika setiap keluarga berhasil menanamkan nilai Sila Pertama dengan baik, hal ini berkontribusi pada terbentuknya generasi muda yang beriman, bermoral, dan mampu menjaga harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KETUHANAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DESA DASOK

Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Sila Pertama Pancasila, tidak hanya menjadi pedoman individu tetapi juga memengaruhi pola interaksi dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai ini mencakup pengamalan ajaran agama, pembentukan toleransi, serta penguatan harmoni sosial di tengah keberagaman. Di Desa Dasok, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas kolektif yang mencerminkan kesadaran religius masyarakatnya. Salah satu wujud nyata implementasi nilai Ketuhanan adalah pengamalan ajaran agama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keluarga-keluarga di Desa Dasok (Darmaputra & Maulidyah, 2023), misalnya, secara rutin melibatkan anakanak mereka dalam tradisi keagamaan lokal seperti pengajian, doa bersama, atau perayaan hari besar

keagamaan. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat hubungan individu dengan Tuhan tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga, menciptakan solidaritas yang berbasis spiritualitas.

Selain itu, nilai toleransi sebagai bagian dari Sila Pertama juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Dasok. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, masyarakat Desa Dasok dikenal menjunjung tinggi penghormatan terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, warga menunjukkan sikap saling menghormati dengan tidak mencampuri urusan keagamaan orang lain dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya (Annisa et al., 2023). Misalnya, ketika ada warga yang melangsungkan acara keagamaan tertentu, tetangga dari keyakinan lain turut membantu dalam hal logistik atau pengaturan tempat sebagai bentuk solidaritas. Implementasi nilai Ketuhanan juga terlihat dalam cara masyarakat Desa Dasok menyelesaikan konflik. Ketika terjadi perselisihan antar warga, tokoh agama setempat sering berperan sebagai mediator yang mengedepankan pendekatan religius dalam mencari solusi. Mereka mengingatkan pentingnya memaafkan dan menjaga kerukunan sebagaimana diajarkan dalam agama. Proses ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat turut mendukung implementasi nilai-nilai Ketuhanan ini dengan memberikan contoh nyata kepada anak-anak mereka. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang lain, membantu sesama, dan menunjukkan kepedulian terhadap tetangga yang membutuhkan. Dalam konteks Desa Dasok, hal ini sering diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, baik dalam pembangunan fasilitas umum seperti masjid maupun dalam membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Dasok tidak hanya berkontribusi pada pembentukan karakter individu tetapi juga memperkuat struktur sosial yang harmonis. Pola kehidupan yang mengutamakan nilai-nilai religius ini menjadi bukti bahwa Sila Pertama Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan sejahtera.

C. PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA KELUARGA DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA BERBASIS PANCASILA

Dalam perspektif hukum, pembentukan karakter bangsa yang berbasis nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, merupakan bagian dari kewajiban negara yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup kewajiban negara untuk mendukung peran keluarga sebagai institusi pertama dalam pendidikan moral dan spiritual. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat, regulasi yang ada harus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Tarigan, n.d.), yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama, moral, dan budaya harus dimulai dari keluarga. Dalam konteks ini, keluarga di Desa Dasok menjadi ujung tombak pembentukan karakter religius yang selaras dengan Sila Pertama Pancasila. Orang tua memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan toleransi sejak dini kepada anakanak mereka. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah melalui program pembinaan keluarga harmonis yang berbasis agama.

Lebih jauh lagi, peran hukum dalam mendukung upaya keluarga dapat dilihat melalui regulasi yang mengatur program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, program Posyandu Keluarga dan kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan di Desa Dasok sering kali difasilitasi oleh pemerintah desa sebagai bentuk implementasi kebijakan yang berpihak pada pembentukan karakter bangsa (Nilai et al., 2021). Program-program ini tidak hanya memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak-anak tetapi juga menciptakan komunitas yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi landasan nilai-nilai budaya di Pamekasan, khususnya di Desa Dasok, terdapat pula prinsip-prinsip fiqh yang menekankan pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Orang tua dianggap bertanggung jawab secara syar'i untuk memastikan anak-anak mereka memahami konsep ketuhanan, menjalankan ibadah dengan benar, dan memiliki etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara (Nadah et al., 2021).

Namun demikian, upaya pembentukan karakter bangsa melalui keluarga juga menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal penegakan regulasi dan sinkronisasi kebijakan. Misalnya, kurangnya pengawasan terhadap implementasi program pemberdayaan keluarga berbasis Pancasila sering kali menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks Desa Dasok, beberapa keluarga yang kurang mendapatkan akses terhadap program pendidikan dan pembinaan keluarga berbasis keagamaan cenderung mengalami kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut secara efektif (Lubis & Medan, n.d.).

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar dapat diterapkan di tingkat lokal. Pemerintah, melalui perangkat desa dan tokoh agama, perlu memberikan dukungan yang lebih konkret, seperti

penyediaan modul pendidikan berbasis Pancasila atau pelatihan khusus bagi keluarga dalam mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini akan memperkuat landasan hukum dan sosial bagi keluarga untuk berperan aktif dalam membentuk karakter bangsa. Dengan adanya kerangka hukum yang mendukung dan peran aktif keluarga di tingkat akar rumput, nilai-nilai Sila Pertama Pancasila dapat terinternalisasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat Desa Dasok. Hal ini tidak hanya membantu membentuk generasi muda yang religius dan bermoral tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Upaya pembentukan karakter bangsa berbasis nilai-nilai Sila Pertama Pancasila melalui peran keluarga merupakan langkah strategis yang signifikan dalam membangun fondasi moral dan spiritual masyarakat. Keluarga, sebagai institusi pertama dalam pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, baik melalui pembiasaan ibadah, pengajaran etika, maupun pembentukan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan sinergi yang kuat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, nilai-nilai Sila Pertama Pancasila dapat diinternalisasi secara efektif, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya ini pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa yang religius, toleran, dan beretika, yang menjadi

REFERENSI

- Ahmad, J. M., Adrian, H., & Arif, M. (2021). Pentingnya Menciptakan Pendidikan Karakter Dalam lingkungan keluarga. *Jurnal Pendias*, 3(1), 1–24.
- Amalia, F., & Najicha, F. U. (2023). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa. Jurnal Global Citizen, 12(1), 1–6.
- Annisa, F., Karmelia, M., & Maulia, S. T. (2023). Penerapan Pembelajaran Inovatif Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Membentuk Karakter Siswa. 05(04), 13748–13757.
- Ariani, F. (2019). Orang Tua Sebagai Penanam Nilai Pancasila Untuk Anak Usia Dini Di Era Digital. Journal of Early Childhood Education (JECE), 1(2), 60–68. https://doi.org/10.15408/jece.v1i2.12515 Darmaputra, P., & Maulidyah, S. (2023). Cendikia pendidikan. 1(12).
- Lubis, T. Y., & Medan, U. N. (n.d.). PENDAHULUAN Karakter peserta didik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan bahkan merupakan sebuah kekhawatiran serius dalam kepentingan pendidikan terlebih ketika moralitas diabaikan dalam sistem berperilaku di lingkup sekolah dan masyarakat . Peng.
- Nadiah, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila*. 5(3), 7875–7883.
- Nilai, I., Diponegoro, K., Untuk, P., Profil, M., Pancasila, P., Sekolah, D. I., Integration, T. H. E., Character, O. F., Of, V., In, D., Activities, L., & Form, T. O. (2021). *Jurnal kebudayaan*. 16.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. 'Adalah, 4(2), 39–44. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108
- Sinal, M. (2017). Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia. In Malang: Madani. Madani.
- Sonata, D. L. (2015). metode penelitian hukum normatif, empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. pertama.
- Sudrajat, T., Hasanah, A., Sangga, U., Bandung, B., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2020). NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERADABAN BANGSA: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. 6(November), 857–867.
- Tarigan, B. P. (n.d.). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Milenial Yang Bertanggung Jawab BORNEO Law Review. 36, 37–51.